

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pemerintah tengah menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi guna mengumpulkan, mengklasifikasi, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pemerintah secara ekonomi dan terkontrol. Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat bantu pemerintah untuk mengukur kinerja dari sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh pemerintah tersebut yang selama ini sudah berjalan.

Pada tahun 2017 ini, Arief R Wisnansyah selaku Walikota Tangerang, baru saja memperbaharui dan menandatangani kontrak tentang kinerja sistem informasi akuntansi bersama dengan Kepala Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai alat bantu pemerintah untuk mengukur kinerja aplikasi dan kecocokan aplikasi yang digunakan dengan kebutuhan di lapangan dimana khususnya memudahkan para pengguna dalam pengoperasiannya, serta minimnya *error* pada aplikasi. Pemerintah Kota Tangerang juga telah menganggarkan biaya sebesar Rp4,14 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1,50 triliun dan belanja langsung sebesar Rp2,64 triliun yang akan didistribusikan ke dinas-dinas yang ada di Kota Tangerang. Dengan penandatanganan kontrak

kinerja diharapkan apa yang telah direncanakan bisa tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang ([www.bantenhits.com](http://www.bantenhits.com)).

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004, Kementerian Keuangan selaku penyelenggara bendahara umum Negara, menyelenggarakan fungsi perimbangan keuangan di antaranya adalah menentukan tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil dan dana alokasi tersebut adalah dana dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada daerah untuk keperluan daerah. Untuk mendapatkan dana alokasi tersebut dibutuhkan beberapa laporan bulanan yang harus dikirim kepada pemerintah pusat. Laporan tersebut seperti perkiraan belanja operasi dan belanja bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 144 pemerintah daerah yang penyaluran dana alokasi umumnya masih tertunda karena keterlambatan dalam menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja bulanan, laporan posisi kas bulanan dan laporan realisasi APBD bulanan sehingga dikenakan sanksi atas keterlambatannya. Berikut adalah tabel daerah yang dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum atas keterlambatan penyampaian laporan:

**Tabel 1.1**

**Daerah yang dikenakan sanksi penundaan**

No.	Jumlah Daerah	Jenis Dana Perimbangan	Besaran Presentase
1	36 Daerah	Dana alokasi umum	5,0%
2	71 Daerah	Dana alokasi umum	7,5%
3	37 Daerah	Dana alokasi umum	10,0%

Sumber: KMK No. 6/KMK.7/2016

Pengenaan sanksi dilaksanakan sampai dengan laporan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulan Januari, dan ringkasan realisasi APBD bulan Januari 2016 disampaikan oleh pemerintah daerah kepada menteri keuangan. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana dicabut setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulan Januari, dan ringkasan realisasi APBD bulan Januari 2016. Kota Tangerang sudah menerapkan sistem informasi keuangan daerah semenjak adanya perubahan ketentuan pada peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 11 tahun 2011, perubahan ketentuan tersebut terdapat pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan” dan pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Dinas Pengelolaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Pengelolaan pajak daerah;
- e. Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah;
- g. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah;
- h. Pengelolaan administrasi, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;

- i. Pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi perencanaan;
- j. Pengkoordinasian lintas sektor;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”.

Dengan adanya peraturan baru terutama pada ayat 2 bagian g tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang mulai menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk memberikan kesadaran mengenai kebijakan dan pengelolaan pemanfaatan dana publik dengan menggunakan sistem terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Perkembangan yang terjadi pada bidang informasi akuntansi ini dapat membantu pemerintah untuk pengukuran kinerja sistem informasi akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang tersebut ([www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)).

Kinerja sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, dapat dipercaya, tepat waktu dan relevan sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan mudah dipahami dan dapat disajikan secara detail dan benar, sehingga kinerja sistem informasi akuntansi tersebut membuat pengguna merasa puas karena sistem dapat bekerja dengan cepat dalam mengakses data, handal dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan, dan dapat meningkatkan kapasitas pemrosesan data secara signifikan serta dengan adanya keamanan dan fitur bantuan dalam sistem dapat memudahkan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dalam menginput data.

Pemerintah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tersendiri untuk setiap dinas di Indonesia yaitu menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan tujuan supaya keuangan setiap daerah bisa dipantau melalui laporan keuangan setiap daerah di Indonesia yang penyebarannya masih belum merata di setiap daerahnya. Menurut Budiriyanto (2013) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sementara itu, dalam penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 pasal 13 huruf a, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Dari dua pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah bagian/sub sistem dari SIKD.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD ini diolah oleh subdit informasi pengelolaan keuangan daerah

pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas dari kementrian dalam negeri kepada daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi SIPKD, maka penggunaannya ditunjukkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD, diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis dan pengembangan koordinasi, yaitu:

1. Wilayah I, yaitu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;
2. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regiona di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;

4. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;
5. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagi pemerintahan daerah yang berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), akan mendapat pelatihan intensif mengenai cara penggunaan maupun pemeliharaan. Bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)).

Dalam menggunakan sistem informasi akuntansi, dinas tidak ingin menghadapi permasalahan berupa kegagalan penerapan. Semua menginginkan sistem informasi akuntansi yang digunakan berhasil dan memiliki kinerja yang baik. Untuk memiliki kinerja yang baik penting bagi dinas untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu sistem informasi akuntansi antara lain adalah partisipasi pemakai, pelatihan, kepuasan pemakai, dan dukungan atasan.

Menurut penelitian Ferdianti (2017) dan Lestari (2017) partisipasi pemakai berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Partisipasi pemakai adalah pemakai yang bersedia menggunakan sistem informasi akuntansi, bersedia memberikan informasi mengenai keunggulan dan kelemahan dari sistem informasi akuntansi, karena sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat memperluas wawasan pemakai dalam bidang komputer, dengan begitu pengguna dapat ikut serta dalam menjalankan sistem informasi akuntansi yang sudah ada dan dengan adanya partisipasi pemakai dapat mengurangi biaya pemeliharaan sistem. Apabila pemakai bersedia menggunakan sistem, bersedia memberikan keunggulan dan kelemahan dari sistem, partisipasi pemakai dapat memperluas wawasan pemakai dalam bidang komputer, ikut serta dalam menjalankan sistem informasi dan dapat mengurangi biaya pemeliharaan sistem, sehingga dapat cepat dalam mengakses data dan dapat meningkatkan kapasitas pemrosesan data secara signifikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, semakin tinggi partisipasi pemakai maka semakin tinggi kinerja sistem informasi akuntansi. Tetapi tidak semua penelitian mendukung bahwa partisipasi pemakai memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja SIA, Anggraini (2012) dan Widhiyani (2013) menyatakan bahwa partisipasi pemakai tidak berpengaruh positif terhadap kinerja Sistem informasi akuntansi.

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang diperlukan untuk menggunakan SIPKD dan untuk memiliki pengetahuan dalam menjalankan SIPKD tersebut serta adanya instruktur khusus yang membantu penggunaan SIPKD dan tenaga ahli yang membantu penyelesaian masalah dalam menggunakan SIPKD sehingga SIPKD



tersebut dapat sesuai dengan cara bekerja pegawai. Dengan adanya pengetahuan dan instruktur khusus maka pegawai dapat mengakses data dengan cepat, menghasilkan informasi yang handal dan membuat pengguna merasa puas dalam menggunakan *software* yang mendukung penggunaan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hal-hal tersebut semakin tinggi pelatihan maka semakin tinggi kinerja sistem informasi akuntansi. Faktor pelatihan ini pun mengalami perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruhnya terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian Sujana (2017) dan Suardikha (2016) mengatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, sedangkan dalam hasil penelitian Ferdianti (2017) dan Halimatusadiah (2015), pelatihan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Kepuasan pemakai adalah penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pemakai, memberikan manfaat bagi pemakai, membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, meningkatkan kualitas *output*, dan meningkatkan efektivitas pekerjaan sehingga meningkatkan peluang pemakai untuk naik jabatan. Dengan adanya penggunaan sistem yang meningkatkan produktivitas, memberi manfaat bagi pengguna, membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, meningkatkan kualitas *output*, meningkatkan efektivitas pekerjaan, dan meningkatkan peluang untuk naik jabatan, maka akan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta informasinya bersifat detail dan benar. Berdasarkan hal-hal tersebut, semakin tinggi kepuasan pemakai maka semakin tinggi kinerja sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian Rahmawati (2013) mengatakan bahwa Kepuasan pemakai berpengaruh positif

terhadap kinerja SIA. Sedangkan hasil penelitian Komara (2006) menemukan bahwa kepuasan pemakai belum berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi tersebut.

Dukungan atasan adalah adanya partisipasi atasan untuk mempengaruhi pemakai dan membantu pemakai dalam menggunakan SIPKD serta membuat pengguna memahami SIPKD sehingga pengguna menjadi ahli dalam menggunakan SIPKD. Apabila atasan membantu dalam penggunaan SIPKD dan memahami SIPKD, maka akan membantu menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya sehingga informasi yang dihasilkan dapat tepat waktu. Berdasarkan hal-hal tersebut, semakin tinggi dukungan atasan maka semakin tinggi kinerja sistem informasi akuntansi. Melalui Penelitian terdahulu, Lestari (2017) dan Saebani (2016) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kinerja SIA, sedangkan hasil penelitian Murtini (2014) dan Ferdianti (2017) menunjukkan bahwa dukungan atasan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian terkait dengan topik tersebut masih menunjukkan perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya sehingga hal ini dapat menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait topik ini. peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja SIA. Peneliti mengambil SKPD Kota Tangerang sebagai sampel penelitiannya karena pemerintah saat ini sedang menjalankan program baru yang salah satunya adalah pemakaian SIPKD agar setiap daerah dapat dengan lebih mudah mengolah data menjadi sebuah informasi

yang berupa laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas, topik dan judul yang dipilih peneliti adalah **“PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI, PELATIHAN, KEPUASAN PEMAKAI DAN DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (studi pada SKPD Kota Tangerang)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan pada lingkup masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja sistem informasi akuntansi;
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi pemakai sistem informasi akuntansi, pelatihan, kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi dan dukungan atasan;
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang. Responden yang dipilih yaitu pegawai SKPD yang menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah atau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta pegawai yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tangerang.
4. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2018.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi?
2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi?
3. Apakah kepuasan pemakai berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi?
4. Apakah dukungan atasan berpengaruh juga terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan studi empiris diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menemukan bukti empiris bahwa partisipasi pemakai sistem informasi akuntansi, pelatihan, kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi, dan dukungan atasan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, untuk memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi serta untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan dengan baik atau masih ada kekurangan pada

sistem yang nantinya dapat diperbaiki supaya sistem dapat digunakan dengan baik, lancar tanpa kendala.

2. Bagi masyarakat, untuk mengetahui sistem apa yang digunakan SKPD dan untuk memahami bagaimana kinerja sistem informasi akuntansi.
3. Bagi dosen, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pemikiran dan pengembangan teori-teori dalam pemecahan masalah yang terjadi sehingga dapat dibuktikan bahwa teori tersebut benar.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan lebih dalam lagi.
5. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang kinerja sistem informasi akuntansi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab ini menjelaskan tentang telaah literatur yang berisi landasan teori yang terdiri dari kinerja sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan daerah, partisipasi pemakai, pelatihan, kepuasan pengguna dan dukungan atasan, hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik bahasan penulis, hipotesis berdasarkan

landasan teori yang dipakai, serta kerangka pemikiran atau model penelitian yang dilakukan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan penulis.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian, penjelasan bagaimana menganalisa data yang sudah ada serta berisi tentang pengolahan data berdasarkan karakteristik responden, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik serta uji hipotesis.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

UMMN